

ABSTRAK

Efit Arum Handini. 2026. Kesesuaian Yuridis Sanksi Tindakan Pendidikan Pesantren Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Terhadap Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun). Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Pembimbing (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H. (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

Peningkatan keterlibatan anak dalam tindak pidana menuntut penerapan sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian yuridis sanksi tindakan pendidikan pesantren yang dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kesesuaian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dengan asas *ultimum remedium* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; dan (2) pemenuhan asas kepastian hukum serta perlindungan hak-hak anak melalui sanksi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas *ultimum remedium*. Meskipun anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa program pendidikan dan pembimbingan di Pondok Pesantren Riyaadlul Jannah Kota Madiun. Diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi tujuh tahun, namun hakim tetap mengedepankan prinsip *the best interests of the child* berdasarkan kondisi anak dan rekomendasi Litmas Balai Pemasyarakatan. Sanksi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta menjamin hak anak atas pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi tindakan pendidikan pesantren mencerminkan paradigma peradilan pidana anak yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Kesesuaian Yuridis, Sanksi Tindakan, Pendidikan Pesantren, Anak Pelaku Tindak Pidana, *Ultimum Remedium*, Kepastian Hukum, Perlindungan Hak Anak.

ABSTRACT

Efit Arum Handini. 2026. Juridical Conformity of the Islamic Boarding School Educational Sanction Imposed on a Child Offender (A Study of Court Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun). Undergraduate Thesis. Law Study Program. Faculty of Law, Universitas PGRI Madiun. Supervisors: (I) Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.; (II) Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.

The increasing involvement of children in criminal offenses requires a juvenile justice system that emphasizes rehabilitation and the best interests of the child rather than punishment. This study examines the juridical appropriateness of imposing an educational measure through an Islamic boarding school (pesantren) on a juvenile convicted of aggravated motor vehicle theft in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Madiun. The research analyzes: (1) the consistency of the court's ratio decidendi with the ultimum remedium principle under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, and (2) the fulfillment of legal certainty and the protection of children's rights through the imposed sanction. This normative legal research employs statutory, case, and conceptual approaches using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the court's reasoning is consistent with the ultimum remedium principle. Although the juvenile was found guilty under Article 477 paragraph (1) letter (e) of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, the court imposed an educational measure at Pondok Pesantren Riyaadlul Jannah instead of imprisonment. The decision was based on the child's personal circumstances, the Social Inquiry Report (Litmas), and the best interests of the child principle. The sanction is supported by Article 82 of the Juvenile Criminal Justice System Law and Law Number 18 of 2019 on Islamic Boarding Schools, ensuring the child's rights to education, rehabilitation, and social reintegration. The decision reflects a restorative and humanistic approach to juvenile criminal justice.

Keywords: Legal Sustainability, Punitive Measures, Pesantren Education, Child Criminal Offenders, Ultimum Remedium, Legal Certainty, Protection of Children's Rights.